

LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN
KALIMANTAN BARAT
TAHUN 2016



BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN KALIMANTAN BARAT
BALAI BESAR PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2016

KATA PENGANTAR

Merujuk pada PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang disampaikan ke MenKeu, Kepala Bappenas dan MenPANRB, Laporan Kinerja dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Diatur lebih lanjut Peraturan Presiden diusulkan oleh MenKeu setelah berkoordinasi dengan kepala Bapenas, MenPANRB dan Mendagri.

LAKIN BPTP Kalimantan Barat ini disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban institusi pemerintah terhadap berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama kurun waktu 1 tahun (2016). Laporan ini bertujuan untuk mengevaluasi atau mengkaji ulang semua kegiatan yang telah dilakukan oleh BPTP Kalimantan Barat selama satu tahun. Hasil evaluasi ini sangat bermanfaat untuk memberikan masukan penyempurnaan penyusunan rencana kegiatan tahun berikutnya dengan memperhatikan dan memperbaiki kekurangan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan dokumen pelaporan yang memberikan informasi mengenai kinerja yang telah dicapai yang diperhitungkan atas dasar rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

Informasi ringkas yang disampaikan dalam laporan ini masih jauh dari sempurna, namun demikian diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak. Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan laporan ini, kami sampaikan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan untuk perbaikan dimasa mendatang.

Pontianak, 31 Desember 2016

Kepala Balai,



Ir. Jiyanto, MM

NIP. 19611001 198603 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPTP Kalimantan Barat dibentuk untuk mempercepat arus informasi agar hasil-hasil penelitian dapat segera sampai di tangan para pengguna. Institusi ini mempunyai visi menjadi lembaga pengkajian inovasi pertanian spesifik lokasi yang dapat meningkatkan profesionalisme petani dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial di Kalimantan Barat. Sedangkan misinya adalah menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul dan sesuai dengan kebutuhan pengguna didukung kelembagaan pengkajian yang kuat serta mengembangkan jejaring kerjasama di tingkat regional, nasional dan internasional.

Tugas pokok Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat adalah melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian spesifik lokasi. Sedangkan fungsinya adalah: 1) Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 2) Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 3) Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi teknologi, 4) Penyiapan kerjasama, informasi, dokumentasi serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, 5) Pemberian pelayanan teknik kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, dan 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai. Secara garis besar tugas dan tujuan BPTP adalah melaksanakan kegiatan penelitian komoditas, pengkajian dan perakitan teknologi tepat guna spesifik lokasi.

Dalam melaksanakan tugas, BPTP mempunyai tujuan : (1) Menghasilkan dan mengembangkan (mendiseminasikan) inovasi pertanian unggulan spesifik lokasi sesuai kebutuhan pengguna (2) Meningkatkan manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian serta mengembangkan jejaring kerjasama regional, nasional dan internasional.

Namun demikian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPTP Kalimantan Barat masih mengalami beberapa kendala dan permasalahan yang ada seperti terbatasnya sumberdaya manusia, terbatasnya sarana dan prasarana yang memadai, dan terbatasnya sumberdana. Oleh karena itu untuk meningkatkan

kinerja BPTP Kalimantan Barat dalam menjalankan tupoksinya, dilakukan kerjasama dengan Pemda Kalimantan Barat, Perguruan Tinggi, Balit/Puslit, dan Swasta. Guna mendukung program daerah Provinsi Kalimantan Barat di bidang pertanian beberapa instansi di lingkungan Pemda Provinsi Kalimantan Barat yang telah bekerjasama dengan BPTP Kalimantan Barat adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan, Dinas Kehewanan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Instansi terkait lainnya.

BPTP Kalimantan Barat juga bekerjasama dengan beberapa Puslit/Balai Besar/Balit di lingkup Badan Litbang Pertanian dalam mendukung pendampingan program strategis kementerian pertanian seperti Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Balai Besar Pasca Panen, Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balai Besar Sumberdaya Lahan Pertanian, Balitnak Ciawi, Balitra Banjarbaru, dan Balitjestro Tlekung.

Sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsinya maka program pengkajian dan diseminasi yang dilakukan BPTP harus mendukung Program Pembangunan Pertanian Nasional maupun Daerah yang secara garis besar meliputi program pendampingan SL-PTT padi, jagung dan kedelai, program kawasan sayuran organik, program percepatan swasembada daging sapi dan kerbau (PSDSK), program model kawasan rumah pangan lestari (M-KRPL), Pengembangan Kalender Tanam Dinamis Terpadu untuk Mendukung Produksi Padi Sawah di Kalimantan Barat, Denfarm Kedelai, dan Koordinasi Pendampingan PUAP.

Untuk mendukung program nasional dan daerah tersebut, maka BPTP Kalimantan Barat pada tahun 2016 melaksanakan Kegiatan utama yaitu:

1. Tersedianya teknologi spesifik lokasi komoditas strategis
2. Tersedianya teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya
3. Tersedianya Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri
4. Terdiseminaskannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi
5. Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan
6. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi (Decentralized Action Plan/DAP)
7. Dihasilkannya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

BPTP Kalimantan Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya serta untuk mempermudah evaluasi indikator kinerja dikelompokkan menjadi 3, yaitu (1) indikator masukan, (2) keluaran, dan (3) hasil, Indikator masukan; terdiri dari beberapa jenis yang menunjang keberhasilan kegiatan dan pelaksanaan tugas dan fungsi BPTP Kalimantan Barat antara lain sumberdaya manusia, dana/anggaran, sarana dan prasarana. Total dana yang diterima dari APBN oleh BPTP Kalimantan Barat dalam DIPA 2016 sebesar Rp. 14.970.617.000,- yang dapat direalisasi sebesar Rp. 14.099.229.746,- atau sebesar 94,18% yang tidak terealisasi sebesar Rp. 871.387.254,-. Dana yang tidak dapat terealisasi tersebut telah dikembalikan dan disetor ke kas negara. Dana yang tidak dapat terealisasi tersebut karena terlambatnya waktu koordinasi dengan pemerintah kabupaten Bengkayang dalam merencanakan kerjasama sehingga berdampak pada kurang optimalnya penyerapan anggaran kerjasama, banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan dengan jumlah SDM yang terbatas sehingga khusus untuk SDM yang melakukan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan satker menjadi terbatas dan berdampak pada penyerapan anggaran yang kurang optimal, kegiatan pendampingan PSDSK dilaksanakan mendekati akhir tahun sehingga penyerapan anggaran kurang optimal, dan penyerapan belanja bahan untuk keperluan laboratorium benih belum optimal yang disebabkan belum beroperasinya laboratorium tersebut.

Dengan demikian dana yang tidak terserap tersebut disebabkan oleh faktor teknis dan faktor manajemen. Kelemahan dari bidang penelitian ini adalah sering terjadi tidak sinkronnya antara turunnya anggaran dengan pelaksanaan penelitian. Artinya sering kali terjadi keterlambatan turunnya anggaran yang terlalu lama, sedangkan pelaksanaan penelitian harus dilakukan karena musim.

Dalam upaya meningkatkan kinerja BPTP Kalimantan Barat, maka masalah yang ada harus segera diatasi antara lain dengan menjalin kesepakatan antara BPTP Kalimantan Barat dengan BPKP dan Irjentan. Untuk itu perlu dirintis untuk merumuskan kesepakatan secara formal kebijakan Balai antara BPTP Kalimantan Barat dengan BPKP dan Irjentan dalam hal kegiatan yang tergantung musim tanam sehingga lewat tahun anggaran.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi, Tugas, Fungsi dan Organisasi.....	2
C. Tujuan dan Sasaran	5
II. PERENCANAAN KINERJA	6
III. AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Akuntabilitas Kinerja	19
B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016	37
C. Analisis Capaian Kinerja	39
D. Realisasi Anggaran	39
V. PENUTUP	50
V1. LAMPIRAN	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Rencana Strategis Tahun 2015-2019	42
Lampiran 2.	Rencana Kinerja Tahunan 2016.....	45
Lampiran 3.	Pengukuran Kinerja Kegiatan 2016.....	60
Lampiran 4.	Penetapan Kinerja Tahun 2016	74
Lampiran 5.	Pengukuran Pencapaian Sasaran 2016	76
Lampiran 6.	Penetapan Kinerja Tahun 2016.....	78
Lampiran 7.	Rencana Kinerja Tahun 2016.....	80
Lampiran 6.	Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2016	95

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kalimantan Barat dibentuk melalui keputusan Menteri Pertanian RI No. 350/KPts/OT.210/6/2001 tertanggal 14 Juni 2001 yang sebelumnya berupa Loka Pengkajian Teknologi Pertanian (LPTP) Kalimantan Barat berdasarkan keputusan Menteri Pertanian RI No. 798/KPts/OT.210/12/94 dengan mandat/tugas pokok melaksanakan pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Keberadaan BPTP ini membuka peluang yang lebih besar bagi tersedianya teknologi maju untuk mendukung pembangunan pertanian di Propinsi Kalimantan Barat, sesuai dengan kebijakan, kondisi sumberdaya alam dan sumberdaya riset, sosial ekonomi pertanian dan budaya masyarakat setempat.

Sebagai lembaga pemerintah BPTP Kalbar berusaha untuk mewujudkan suatu lembaga pemerintahan yang transparan dan kredible, salah satunya dengan memberikan LAKIP (Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah). Payung hukum pelaksanaannya yaitu :

- UU No 17/2003 tentang Keuangan Negara
- UU No 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara
- UU No 15/2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara

Merujuk pada peraturan di atasnya tersebut maka pemerintah mengeluarkan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Instansi Pemerintah wajib menyusun laporan kinerja yang disampaikan ke MenKeu, Kepala Bappenas dan MenPANRB, Laporan Kinerja dihasilkan dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan Sistem Akuntansi Pemerintahan yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Diatur lebih lanjut Peraturan Presiden diusulkan oleh MenKeu setelah berkoordinasi dengan kepala Bapenas, MenPANRB dan Mendagri.

Selanjutnya dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 disebutkan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan/atau evaluasi Kinerja pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah

sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kewenangannya. Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan laporan evaluasi atas implementasi SAKIP kepada Menteri PAN RB. Kementerian PANRB mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi atas implementasi SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah Daerah.



Gambar 1. Hierarki LAKIP berdasarkan Perpres no. 29/2014 tentang SAKIP.

Untuk itu Kementerian PANRB mengeluarkan PermenPANRB No. 12 Tahun 2015 yaitu Pedoman evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Diharapkan dengan LAKIN ini dapat menggambarkan Kinerja BPTP Kalimantan Barat melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menggambarkan mengenai sasaran dan tujuan instansi BPTP Kalimantan Barat sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

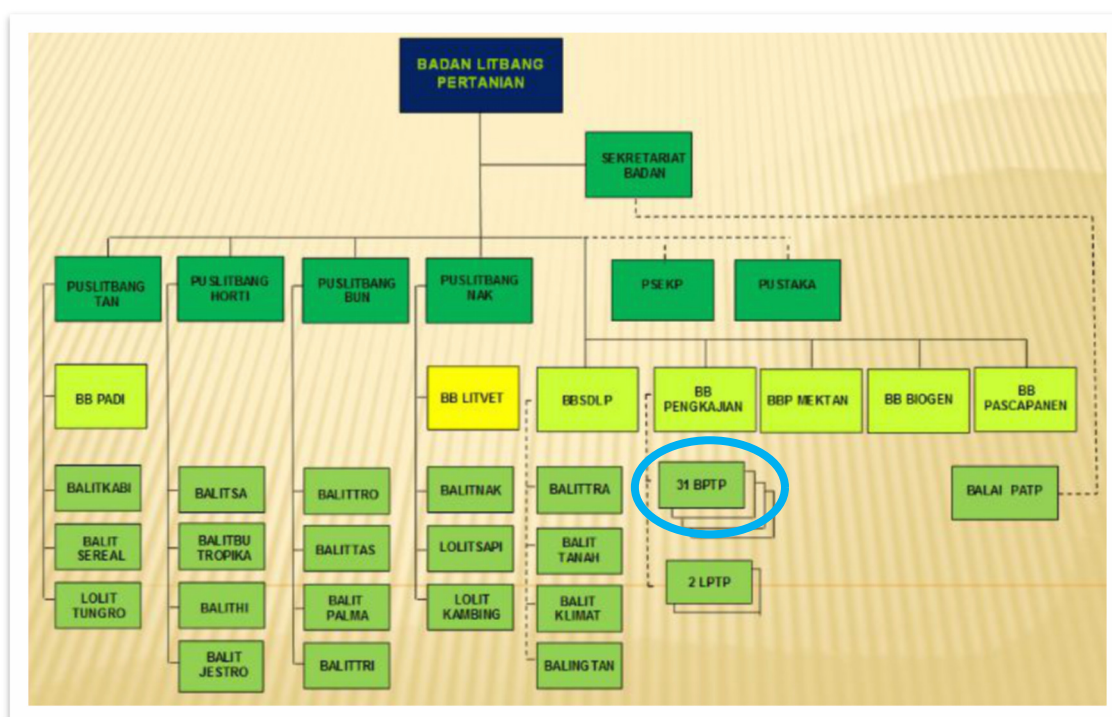
Hal ini sebagai salah satu pertanggungjawaban dari unit kerja mandiri yang berada di bawah Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian yang memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan atas pelaksanaan DIPA Tahun 2016.

Dengan demikian tujuan penyusunan LAKIN BPTP Kalbar ini adalah sebagai berikut:

1. Menilai Pelaksanaan Program dan Kegiatan
2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumberdaya
4. Memberikan Informasi Kinerja Organisasi

B. Visi, Misi, Tugas, Fungsi dan Organisasi

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kementerian Pertanian RI, BPTP Kalbar merupakan perpanjangan tangan Kementan di daerah, sehingga visi, misi fungsi dan keorganisasiannya pun tak terlepas dari hierarki Kementan.



Gambar 2. Struktur organisasi lingkup Balitbangtang kementan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2015 – 2019 akan mewujudkan **6 (Enam) Sasaran Strategis** yaitu: (1) Pencapaian swasembada beras, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula, (2) Peningkatan diversifikasi pangan, (3) Peningkatan komoditas bernilai tambah, daya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor, (4) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi (5) Peningkatan pendapatan keluarga petani, dan (6) Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik.

Balitbangtan merupakan salah satu unit eselon satu di bawah Kementerian Pertanian, karena itu arah kebijakan yang akan diambil terkait erat dengan arah kebijakan pembangunan pertanian.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program disajikan pada Tabel 1, sedangkan keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program Balitbangtan 2015-2019 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 1. Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran program Balitbangtan

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN PROGRAM
Menjadi lembaga penelitian terkemuka penghasil teknologi dan inovasi pertanian modern untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani	1. Menghasilkan dan mengembangkan teknologi pertanian modern dengan produktivitas dan efisien tinggi yang memiliki <i>scientific recognition</i>	1. Menyediakan varietas/galur/klon unggul yang adaptif, produktivitas tinggi, sesuai preferensi pengguna,	1. Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru;
		2. Menyediakan teknologi yang lebih produktif dan efisien serta ramah lingkungan	2. Tersedianya teknologi dan inovasi Pertanian; 3. Tersedianya model pengembangan inovasi 4. Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan Pertanian
	2. Hilirisasi dan masalisasi teknologi pertanian modern sebagai solusi menyeluruh permasalahan pertanian yang memiliki <i>impact recognition</i>	3. Mempercepat dan meningkatkan diseminasi inovasi dan teknologi di tingkat pengguna.	5. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian

Tabel 2. Keterkaitan sasaran program dan indikator kinerja program Balitbangtan

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program
1	Tersedianya varietas dan galur/klon unggul baru	Jumlah Varietas Unggul/Klon/Galur Baru
2	Tersedianya teknologi dan inovasi Pertanian	Jumlah Teknologi dan Inovasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian.
3	Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian	1. Jumlah model sistem kelembagaan dan inovasi spesifik lokasi; 2. Jumlah Taman Sains Pertanian (TSP); 3. Jumlah Taman Teknologi Pertanian (TTP);
4	Tersedianya rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian	1. Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian;
5	Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian	1. Jumlah benih sumber tanaman; 2. Jumlah bibit sumber ternak; 3. Jumlah teknologi yang terdiseminasikan ke pengguna

Sebagai instansi vertikal dari Balitbangtan, dan di bawah koordinasi Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, BPTP Kalimantan Barat juga mempunyai visi yang mengacu pada instansi induk tersebut. Disamping itu juga, visi BPTP Kalimantan Barat tidak terlepas dari visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dimana BPTP Kalimantan Barat berada, karena BPTP Kalimantan Barat menjadi ujung tombak Balitbangtan dalam menumbuhkan inovasi serta mengembangkan teknologi pertanian spesifik lokasi di daerah.

Secara singkat visi BPTP Kalimantan Barat dapat diterjemahkan ke dalam kata-kata kunci sebagai berikut; penyedia teknologi, kebutuhan petani, spesifik lokasi, pertanian industrial, profesionalisme petani. Berdasarkan kata-kata kunci tersebut, maka visi BPTP Kalimantan Barat adalah :

“Pada tahun 2016 menjadi lembaga pengkajian inovasi pertanian spesifik lokasi yang dapat meningkatkan profesionalisme petani dalam mewujudkan kawasan pertanian industrial di Kalimantan Barat”

BPTP Kalimantan Barat menterjemahkan visi tersebut di atas menjadi misi yang harus dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang didasari oleh visi tentang

inovasi teknologi spesifik lokasi, kebutuhan pengguna, diseminasi teknologi pertanian, tantangan dan peluang.

Misi dari BPTP Kalbar adalah:

“Menghasilkan dan mendiseminasikan inovasi pertanian spesifik lokasi yang unggul dan sesuai kebutuhan pengguna didukung kelembagaan pengkajian yang kuat serta mengembangkan jejaring kerjasama di tingkat regional, nasional dan internasional”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 20/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian pertanian yang berada di bawah dan tanggung jawab Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Kementerian Pertanian.

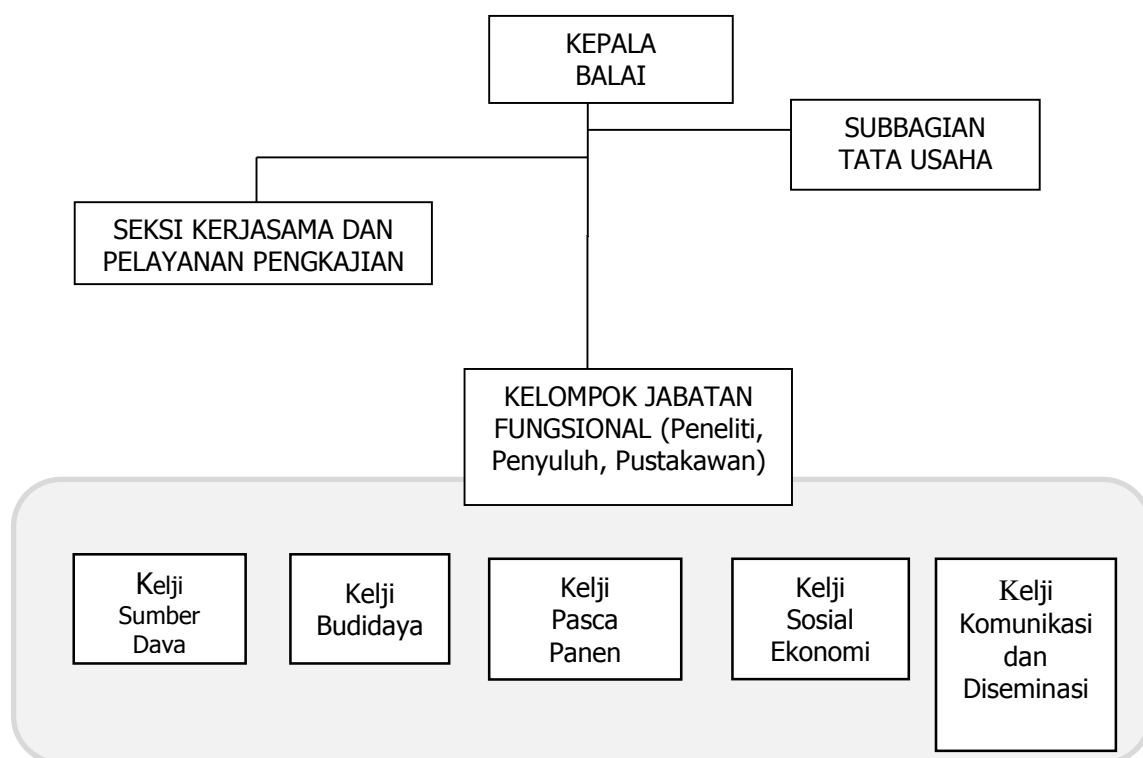
Dalam kesehariannya BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Sedangkan Fungsi BPTP adalah :

1. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
2. Pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
3. Pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;
4. Pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;
5. Penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.
6. Pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi;

7. Pelaksanaan urusan kepegawian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

BPTP Kalimantan Barat merupakan fungsi unit kerja Eselon IIIa yang secara struktural adalah salah satu unit kerja di lingkup Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP). Dalam pelaksanaan kegiatan, secara struktural Kepala Balai dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, dan Kepala Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian (KSPP), dan secara fungsional dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari jabatan fungsional peneliti dan jabatan fungsional penyuluh. Kedua jabatan fungsional tersebut tergabung dalam satu Kelompok Pengkaji (Kelji).

Sub Bagian Tata Usaha bertugas dalam urusan kepegawaian, administrasi dan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga Balai. Seksi Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian bertugas dalam menyiapkan dan pengelolaan informasi, komunikasi, diseminasi hasil penelitian dan pengkajian (litkaji), sarana laboratorium, dan Kebun Percobaan. Dalam tugasnya Kepala Balai dibantu Tim Program dalam persiapan, penyusunan dan perumusan program litkaji. Dalam tugasnya, Tim Program bekerjasama dengan Kelompok Pengkaji (Kelji) yang didukung oleh KSPP dan Sub Bag Tata Usaha. (Gambar 3).



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi BPTP Kalimantan Barat

Kepala Kebun secara fungsional bertugas membantu pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Kelompok Pengkaji di BPTP Kalimantan Barat ada lima kelji yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Kelima kelji tersebut adalah (1) Kelji Sumberdaya, (2) Kelji Budidaya, (3) Kelji Sosial Ekonomi, (4) Kelji Informasi, Komunikasi dan Diseminasi (3Si) dan 5) Kelji Pasca Panen dan Mekanisasi. Tugas penelitian dan pengkajian dari masing-masing kelji berbeda-beda, namun saling mendukung dan bekerjasama.

Kepala Kebun secara fungsional bertugas membantu pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai. Kelompok Pengkaji di BPTP Kalimantan Barat ada lima kelji yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua. Kelima kelji tersebut adalah (1) Kelji Sumberdaya, (2) Kelji Budidaya, (3) Kelji Sosial Ekonomi, (4) Kelji Informasi, Komunikasi dan Diseminasi (3Si) dan 5) Kelji Pasca Panen dan Mekanisasi. Tugas penelitian dan pengkajian dari masing-masing kelji berbeda-beda, namun saling mendukung dan bekerjasama.

C. Tujuan dan Sasaran

Sesuai mandat Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian kepada BPTP Kalbar untuk melakukan pengkajian dan pengembangan teknologi pertanian dan mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut:

Tujuan:

1. Menghasilkan dan mengembangkan inovasi pertanian tropika unggul berdaya saing mendukung pertanian bio-industri berbasis advanced technology dan bioscience, aplikasi IT, dan adaptif terhadap dinamika iklim.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan inovasi pertanian tropika unggul untuk mendukung pengembangan iptek dan pembangunan pertanian nasional.

Sasaran:

1. Tersedianya teknologi dan inovasi budidaya, pasca panen, dan prototipe alsintan berbasis bioscience dan bioenjineri dengan memanfaatkan advanced technology, seperti teknologi nano, bioteknologi, iradiasi, bioinformatika dan bioprosesing yang adaptif.
2. Tersedianya data dan informasi sumberdaya pertanian (lahan, air, iklim dan sumberdaya genetik) berbasis bio-informatika dan geo-spasial dengan dukungan IT.
3. Tersedianya model pengembangan inovasi pertanian, kelembagaan, dan rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian.
4. Tersedia dan terdistribusinya produk inovasi pertanian (benih/bibit sumber, prototipe, peta, data, dan informasi) dan materi transfer teknologi.
5. Penguatan dan perluasan jejaring kerja mendukung terwujudnya lembaga litbang pertanian yang handal dan terkemuka serta meningkatkan HKI.

II. PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja tak terlepas dari Perjanjian Kinerja. Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Dari Perjanjian kinerja inilah disusun Perencanaan Kinerja tahun berjalan.

Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk: (1) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; (3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; (4) menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan (5) sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

BPTP Kalbar sebagai institusi pemerintah yang bersentuhan langsung dengan pengguna dan pemangku kepentingan di berbagai level terutama di daerah, dituntut untuk berperan secara nyata apa, bagaimana, serta dimana kegiatan tersebut telah dilaksanakan, termasuk hasil-hasil kegiatan pengkajian dan diseminasi lingkup BPTP Kalbar. Berbagai program yang dilakukan oleh BPTP Kalbar sepenuhnya untuk mendukung empat target sukses Kementerian Pertanian yaitu: 1) Pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan, 2) Peningkatan diversifikasi pangan, 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing ekspor, dan 4) Peningkatan kesejahteraan petani.

BPTP Kalimantan Barat telah membuat perjanjian kinerja tahun 2016 secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas, dan fungsi yang ada. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2016. Perjanjian kinerja BPTP Kalimantan Barat tahun 2016 disusun dengan berdasarkan pada Rencana Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja BPTP Kalbar 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis	2 Teknologi
		Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya	3 Teknologi

2.	Tersedianya Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri	Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	2 Model
3.	Terdiseminasi inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna	3 Teknologi
4.	Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan	Jumlah Produksi Benih Sumber	39 Ton (FS=13 ton SS = 26 ton)
5.	Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi (Decentralized Action Plan/DAP)	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian wilayah	1 Rekomendasi
6.	Dihasilkannya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi	Jumlah Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	12 Bulan

Sumber: Lembar Pengesahan PK 2016 BPTP Kalbar-Refocusing-2

Untuk menjalankan kegiatan tersebut di atas, pada tahun 2016 BPTP Kalimantan Barat didukung dengan Anggaran yang tertuang pada DIPA BPTP Kalimantan Barat sebesar Rp. 15.292.726.000,- dengan rincian sebagai berikut:

Kegiatan	Anggaran
Kegiatan Pengkajian dan Percepatan Diseminasi Inovasi Teknologi Pertanian	Rp 15.292.726.000,-
1. Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis	Rp 465.000.000,-
2. Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya	Rp 395.000.000,-
3. Jumlah Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri	Rp 900.000.000,-
4. Jumlah teknologi diseminasi yang didistribusikan ke pengguna komoditas strategis	Rp 2.990.930.000,-
5. Jumlah rekomendasi kebijakan	Rp 100.000.000,-
6. Jumlah Produksi Benih Sumber	Rp 695.500.000,-
7. Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian (gaji, operasional perkantoran, modal)	Rp 9.746.296.000,-

III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Akuntabilitas Kinerja

Pengukuran kinerja terhadap keberhasilan Instansi Pemerintah dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual yang dicapai dengan sasaran dan tujuan strategis. Sistem pengukuran kinerja biasanya terdiri atas metode sistematis dalam penetapan sasaran dan tujuan dan pelaporan periodik yang mengindikasikan realisasi atas pencapaian sasaran dan tujuan. Pengukuran kinerja juga didefinisikan sebagai suatu metode untuk menilai kemajuan yang selalu dicapai dibandingkan dengan tujuan yang selalu ditetapkan.

Pengukuran keberhasilan kinerja suatu Instansi Pemerintah diperlukan indikator sebagai tolok ukur pengukuran. Pengertian indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex-ante*), tahap pelaksanaan (*on-going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*post-ante*). Selain itu indikator kinerja digunakan untuk meyakinkan bahwa kinerja hari demi hari organisasi atau unit kerja yang bersangkutan menunjukkan kemajuan dalam rangka menuju kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja Instansi/unit kerja pelaksanaannya.

Sesuatu yang dapat dijadikan indikator kinerja yang berlaku untuk semua kelompok kinerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : (1) Spesifik dan jelas, (2) dapat diukur secara objektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, (3) harus relevan, (4) dapat dicapai, penting dan harus berguna untuk menunjukkan keberhasilan masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan dampak, (5) harus fleksibel dan sensitif dan (6) efektif, data/informasi yang berkaitan dengan indikator dapat dikumpulkan, diolah dan dianalisis.

Secara umum indikator kinerja memiliki beberapa fungsi yaitu (1) dapat memperjelas tentang apa, berapa dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan (2) membangun dasar bagi pengukuran, analisis dan evaluasi kinerja unit kerja.

Dalam penyusunan dan penetapan indikator kinerja dalam kaitannya dengan laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut : (1) menyusun dan menetapkan rencana strategis lebih dulu, (2) melakukan identifikasi data informasi yang dapat dijadikan atau dikembangkan menjadi indikator kinerja dan (3) memilih dan menetapkan indikator kinerja yang paling relevan dan berpengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya pengukuran kinerja dilakukan berdasarkan:

1. Pencapaian perjanjian kinerja tahun berjalan (form 1)
2. Pencapaian perjanjian kinerja 5 tahun terakhir (Form 2)
3. Pencapaian perjanjian kinerja dibandingkan target renstra (Form 3)

B. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2016

Sampai dengan akhir tahun 2016, target yang ditetapkan sebagian besar sudah dicapai, meskipun terdapat juga target yang tidak dapat dicapai seperti dirinci pada Tabel berikut:

Tabel 2. Pengukuran Kinerja BPTP Kalimantan Barat Tahun 2016

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1.	Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis	2 Teknologi	2 Teknologi
		Jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya	3 Teknologi	3 Teknologi
2.	Tersedianya Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri	Jumlah Model Pengembangan Inovasi Pertanian Bioindustri Spesifik Lokasi	2 Model	2 Model
3.	Terdiseminasi kan nya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi	Jumlah teknologi komoditas strategis yang terdiseminasi ke pengguna	3 Teknologi	3 Teknologi
4.	Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan	Jumlah Produksi Benih Sumber	39 Ton (FS=13 ton SS = 26 ton)	39 Ton (FS=13 ton SS = 26 ton)
5.	Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung	Jumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian wilayah	1 Rekomendasi	1 Rekomendasi

	desentralisasi rencana aksi (Decentralized Action Plan/DAP)			
6.	Dihasilkannya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi	Jumlah Dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian	12 Bulan	12 Bulan

Tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja BPTP Kalimantan Barat periode pertama Renstra 2015 - 2019 secara umum menunjukkan hasil yang telah mencapai keberhasilan dari sasaran yang ditargetkan pada tahun tersebut. Hal ini dapat dicapai karena kegiatan yang telah dilaksanakan berjalan secara bersinergi dan didukung oleh anggaran yang telah dialokasikan untuk kegiatan tersebut. Selain itu kesiapan dan kelengkapan dokumen perencanaan yang tepat waktu, intensifnya kegiatan pertemuan Tim Penanggung Jawab Kegiatan di masing-masing unit pelaksana teknis (UPT) untuk memantau capaian pelaksanaan kegiatan, input substansi teknis dari para narasumber dalam pertemuan yang relevan dengan sifat dan jenis kegiatan, kesiapan dan kerjasama yang sinergis antara sumberdaya manusia (peneliti, penyuluh, litkayasa dan tenaga administrasi) dan dukungan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai turut mendukung keberhasilan kegiatan.

C. Analisis Capaian Kinerja

Penjelasan terkait pencapaian masing-masing sasaran kegiatan utama BPTP Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Tersedianya teknologi pertanian spesifik lokasi

- Indikator kinerja kegiatan (IKK) ini terdiri dari 2 yaitu jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas strategis yang ditargetkan 2 capaian dan terealisasi 2 capaian juga dan jumlah teknologi spesifik lokasi komoditas lainnya yang ditargetkan 3 capaian dan terealisasi 3 capaian juga (100% memenuhi target).

- Capaian realisasi kinerja dari kegiatan ini berarti telah 100% memenuhi target. Capaian volume keluaran kegiatan ini pun telah 100% terpenuhi meskipun secara capaian anggaran 70% saja.
- Dibandingkan dengan IKK tahun 2015 lalu prosentase capaian telah dipertahankan tetap 100% terpenuhi. Ini berarti konsistensi terhadap capaian PK tetap terjaga.
- Prosentase capaian dalam kurun 5 tahun ini juga konsisten terjaga 100% capaiannya. Kecuali tahun 2012 yang capainya 88%.
- Berdasarkan pencapaian PK dibandingkan target RENSTRA telah tercapai 100%.
- Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 30 % dari pagu anggaran yang direncanakan.
- Ada beberapa faktor yang mendukung realisasi ini dapat mencapai targetnya, antara lain: (optional)
 - Perencanaan yang matang
 - Dst.

2. Tersedianya Model Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian Bioindustri

- Indikator kinerja kegiatan (IKK) ini yaitu terlaksananya 2 kegiatan model pengembangan inovasi pertanian bio industri spesifik lokasi yang ditargetkan dan terrealisasi 2 kegiatan juga (100% memenuhi target).
- Capaian realisasi kinerja dari kegiatan ini berarti telah 100% memenuhi target. Capaian volume keluaran kegiatan ini pun telah 100% terpenuhi meskipun secara capaian anggaran 78% saja.
- Dibandingkan dengan IKK tahun 2015 lalu prosentase capaian telah dipertahankan tetap 100% terpenuhi. Ini berarti konsistensi terhadap capaian PK tetap terjaga.
- Berdasarkan pencapaian PK dibandingkan target RENSTRA telah tercapai 100%.
- Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 22 % dari pagu anggaran yang direncanakan.
- Ada beberapa faktor yang mendukung realisasi ini dapat mencapai targetnya, antara lain: (optional)

- Perencanaan yang matang
- dst

3. Terdiseminasikannya inovasi teknologi pertanian spesifik lokasi

- Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah terlaksananya sejumlah teknologi strategis yang terdesiminasi ke pengguna.
- Capaian realisasi kinerja dari kegiatan ini berarti telah 100% memenuhi target. Capaian volume keluaran kegiatan ini pun telah 100% terpenuhi meskipun secara capaian anggaran 76% saja.
- Dibandingkan dengan IKK tahun 2015 lalu prosentase capaian telah dipertahankan tetap 100% terpenuhi. Ini berarti konsistensi terhadap capaian PK tetap terjaga.
- Prosentase capaian dalam kurun 5 tahun ini juga konsisten terjaga 100% capaiannya.
- Berdasarkan pencapaian PK dibandingkan target RENSTRA telah tercapai 100%.
- Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 24 % dari pagu anggaran yang direncanakan.
- Ada beberapa faktor yang mendukung realisasi ini dapat mencapai targetnya, antara lain: (optional)
 - Perencanaan yang matang
 - dst

4. Tersedianya benih sumber mendukung sistem perbenihan

- Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah tersedianya sejumlah produksi benih sumber.
- Capaian realisasi kinerja dari kegiatan ini berarti telah 100% memenuhi target. Capaian volume keluaran kegiatan ini pun telah 100% terpenuhi meskipun secara capaian anggaran 97% saja.
- Dibandingkan dengan IKK tahun 2015 lalu prosentase capaian telah dipertahankan tetap 100% terpenuhi. Ini berarti konsistensi terhadap capaian PK tetap terjaga.

- Prosentase capaian dalam kurun 5 tahun ini juga konsisten terjaga 100% capaiannya bahkan melebihi targetnya.
- Berdasarkan pencapaian PK dibandingkan target RENSTRA telah tercapai 100%.
- Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 3 % dari pagu anggaran yang direncanakan.
- Ada beberapa faktor yang mendukung realisasi ini dapat mencapai targetnya, antara lain: (optional)
 - Perencanaan yang matang
 - dst
-

5. Dihasilkannya rumusan rekomendasi kebijakan mendukung desentralisasi rencana aksi (Decentralized Action Plan/DAP)

- Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah adanya sejumlah rekomendasi kebijakan pembangunan pertanian wilayah.
- Capaian realisasi kinerja dari kegiatan ini berarti telah 100% memenuhi target. Capaian volume keluaran kegiatan ini pun telah 100% terpenuhi meskipun secara capaian anggaran 40% saja.
- Dibandingkan dengan IKK tahun 2015 lalu prosentase capaian telah dipertahankan tetap 100% terpenuhi.
- Prosentase capaian dalam kurun 5 tahun ini juga konsisten terjaga 100% capaiannya.
- Berdasarkan pencapaian PK dibandingkan target RENSTRA telah tercapai 100%.
- Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 60 % dari pagu anggaran yang direncanakan.
- Ada beberapa faktor yang mendukung realisasi ini dapat mencapai targetnya, antara lain: (optional)
 - Perencanaan yang matang
 - dst

6. Dihasilkannya sinergi operasional serta terciptanya manajemen pengkajian dan pengembangan inovasi pertanian unggul spesifik lokasi

- Indikator kinerja kegiatan (IKK) adalah terlaksananya sejumlah dukungan pengkajian dan percepatan diseminasi inovasi teknologi pertanian.
- Capaian realisasi kinerja dari kegiatan ini berarti telah 100% memenuhi target. Capaian volume keluaran kegiatan ini pun telah 100% terpenuhi meskipun secara capaian anggaran 90% saja.
- Dibandingkan dengan IKK tahun 2015 lalu prosentase capaian telah dipertahankan tetap 100% terpenuhi. Ini berarti konsistensi terhadap capaian PK tetap terjaga.
- Prosentase capaian dalam kurun 5 tahun ini juga konsisten terjaga 100% capaiannya.
- Berdasarkan pencapaian PK dibandingkan target RENSTRA telah tercapai 100%.
- Terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 10 % dari pagu anggaran yang direncanakan.
- Ada beberapa faktor yang mendukung realisasi ini dapat mencapai targetnya, antara lain: (optional)
 - Perencanaan yang matang
 - dst

D. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai sasaran dengan baik diperlukan dukungan anggaran yang baik dan tepat pula. Berikut ini realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi yang telah dicapai seperti telah diuraikan di atas tersebut.

Dalam tahun anggaran 2016 Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat mendapat alokasi dana sebesar Rp. 14.970.617.000,- merupakan dana APBN Murni, dengan rincian Alokasi anggaran sebagai berikut :

	Pagu	Realisasi	Saldo	% Serapan
B. Pegawai	5.805.460.000	5.783.078.687	22.381.313	99,61%
B. Operasional	1.217.400.000	1.184.524.804	32.875.196	97,30%
B. Barang	6.351.457.000	5.540.232.755	811.224.245	87,23%
B. Modal	1.596.300.000	1.591.393.500	4.906.500	99,69%
Jumlah	14.970.617.000	14.099.229.746	871.387.254	94,18%
T. Blokir	14.284.107.000	14.099.229.746	184.877.254	98,71%

Ket: Realisasi anggaran s/d 31 desember 2016 Rp. 14.099.229.746,- (94,18%) dari pagu anggaran Rp. 14.970.617.000,-. Saldo Rp. 871.387.254,- yang terdiri dari dana terblokir Rp. 686.510.000,- dan Rp. 184.877.254,- yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Dengan rincian alokasi, realisasi, dan sisa anggaran di atas terlihat bahwa sampai dengan Desember 2016 telah tercapai penyerapan anggaran sebesar sekitar 94,18% dari total anggaran yang tersedia. Secara rinci realisasi anggaran per output kegiatan dapat dilihat pada lampiran laporan realisasi anggaran Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kalimantan Barat tahun 2016.

IV. PENUTUP

Penelitian dan pengkajian dilaksanakan berdasarkan program utama BPTP. Kegiatan utama ini memayungi beberapa kegiatan yang dituangkan ke dalam Rencana Pengkajian Tingkat Peneliti (RPTP), Rencana Diseminasi Hasil Pengkajian (RDHP) dan Rencana Kegiatan Tim Manajemen (RKTm). Setiap RPTP/RDHP terdiri atas satu/beberapa judul Rencana Operasional Pelaksanaan Pengkajian (ROPP)/ Rencana Operasional Diseminasi Hasil Pengkajian (RODHP) dan jumlah kegiatan atau ROPP/RODHP untuk tiap-tiap RPTP/RODHP tidak sama.

Ditinjau dari sudut keberhasilan kinerja BPTP Kalimantan Barat, sudah banyak teknologi yang telah dihasilkan oleh BPTP Kalimantan Barat seperti yang telah diuraikan di atas. Kegiatan penelitian telah dirancang dengan baik dan dilakukan monitoring dan evaluasi, namun demikian pada tahun 2016 terdapat kegiatan mengalami kendala karena adanya banjir dan kekeringan serta serangan OPT terutama tikus, burung, blast, keong mas, hawar daun bakteri dan tungro, yang mengakibatkan beberapa kegiatan memberikan hasil yang kurang optimal. Kesepakatan kerjasama dengan petani penangkar pada kegiatan UPBS berupa bagi hasil memberikan dampak hasil benih tidak dapat seluruhnya masuk gudang sehingga benih yang masuk gudang hanya 63% dari total keseluruhan benih yang diproduksi.

Permasalahan yang dihadapi BPTP Kalimantan Barat antara lain adalah sumber daya manusia, dimana tenaga fungsional peneliti dan penyuluh masih kurang. Sumberdaya manusia (SDM) fungsional umumnya masih peneliti non kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, BPTP Kalimantan Barat mengikutsertakan sebagian peneliti dan penyuluh yang masih non kelas untuk ikut pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional baik peneliti maupun penyuluh. Diharapkan hal tersebut dapat memotivasi SDM yang ada untuk segera mengajukan jabatan fungsional.

Selain SDM, pemberdayaan laboratorium dan kebun percobaan sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan pengkajian dan diseminasi. Peralatan laboratorium di BPTP Kalimantan Barat kondisinya masih cukup baik, dan sudah dimanfaatkan dengan baik serta sangat membantu di dalam memberikan informasi data hasil penelitian dan pengkajian. Namun demikian masih ada beberapa alat yang perlu dilengkapi di dalam laboratorium tersebut terutama laboratorium tanah. Selain laboratorium tanah, juga segera akan dioperasikan laboratorium benih

untuk mendukung UPBS High Profile. Oleh karena itu diharapkan Badan Litbang Pertanian perlu memikirkan untuk pengadaan peralatan laboratorium guna menunjang kegiatan penelitian dan pengkajian. Hal yang tidak kalah terpenting adalah dukungan tenaga laboran. Tiga kebun percobaan yang dimiliki BPTP Kalbar sudah dimanfaatkan untuk pelaksanaan penelitian dan pengkajian, produksi benih sumber dan show window.

Dalam upaya memperbaiki Kinerja BPTP Kalimantan Barat perlu disampaikan saran untuk ke dalam (internal) dan ke luar (eksternal) BPTP Kalimantan Barat. Adapun saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perlu ada pembinaan secara sistematis terhadap SDM peneliti dan penyuluh untuk lebih meningkatkan kompetensi baik melalui jalur formal maupun informal
- b. Perlu melakukan revitalisasi peran laboratorium, kebun percobaan, dan perpustakaan dalam mendukung kegiatan litkaji dan diseminasi
- c. Membangun dan melengkapi secara berkelanjutan data base teknologi tepat guna untuk merespon dan mengantisipasi kebutuhan informasi teknologi yang sangat beragam oleh petani, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan
- d. Mempererat jaringan litkaji dan diseminasi dengan Puslit dan Balit Komoditas
- e. Mempererat jaringan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha
- f. Mengkoordinasikan kebutuhan SDM baru terutama dari bidang keahlian hama dan penyakit, pengolahan hasil pertanian, mekanisasi pertanian, dan tenaga laboran.